

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masih diklasifikasikan sebagai negara berkembang, dan kemiskinan adalah masalah yang menjadi pusat perhatian. Masalah kemiskinan dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain termasuk pertumbuhan ekonomi yang lambat, indeks harga konsumen yang tinggi, pendapatan perkapita yang rendah dan meningkatnya pengangguran, (Mahendra 2017).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka, (BPS. 2022)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah

kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa diselesaikan dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia (Mahendra 2017).

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, namun di beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam segi hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013).

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha kebijakan pemerintah dalam mencapai suatu hasil yang positif yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dengan diimbangi jumlah lapangan pekerjaan yang terus meningkat dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata di setiap lapisan daerah. (Siburian, 2013).

Pembangunan ekonomi terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Jadi, keduanya saling berkaitan satu sama lain dan keduanya merupakan aspek penting dalam usaha pencapaian kemakmuran suatu negara (Khoirunnisa, 2017).

Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan perkapita masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi, akan terjadi pertumbuhan

ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. (Murni, 2016).

Menurut Sukirno (2016), masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro, yaitu ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Salah satu dari sekian banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi riil adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Dimana IHK adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK juga sering digunakan untuk mengukur inflasi suatu Negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang, pensiun, dan kontrak lainnya.

IHK menyediakan data tentang perubahan harga dari waktu ke waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Ukuran variasi harga untuk produk dan layanan selama periode waktu tertentu adalah IHK (Karlina, 2017). IHK adalah indikator yang mengukur tingkat pertumbuhan harga selama periode waktu tertentu. Triwulanan dan setahun sekali, perhitungan ini dilakukan (Putong, 2015)

Faktor paling utama yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendapatan perkapita. Pendapatan membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat

di suatu wilayah dapat diukur dari pendapatan per kapita, (Aliasuddin, 2016). Pendapatan perkapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah pada periode tertentu yang dihitung dari pendapatan periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut, (Soejoto, 2015).

Apabila pendapatan masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, (Hanum, 2019). Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat negara tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi pendapatan perkapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Dahliah, 2022), dengan judul *The Influence of Unemployment, Human Development Index and Gross Domestic Product on Poverty level* dimana pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Didalam teori Lewis dijelaskan bahwa tujuan dari proses pembangunan khusus ditujukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, tetapi memiliki masalah kekurangan modal dan keluasaan tanah yang terbatas (Sukirno, 2016). Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menyebabkan kemiskinan adalah seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Dalam konsep pengangguran

terdapat pengangguran terbuka (open enemployment) yaitu tenaga kerja yang menganggur penuh.

Dalam penelitian yang dilakukan (Made, 2016) ,Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Baik negara berkembang maupun negara maju, pengangguran merupakan suatu keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012). Kondisi pertumbuhan ekonomi, Indeks harga konsumen (IHK) pendapatan perkapita, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Indonesia Tahun 2013 - 2023

Tahun	Kemiskinan (KM) (Jiwa)
2013	28,31
2014	28,30
2015	28,55
2016	27,88
2017	27,17
2018	25,81
2019	24,96
2020	27,55
2021	27,54
2022	26,36

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa perkembangan kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir cenderung turun. Pada tahun 2013 kemiskinan sebesar 28,31 jiwa, dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 28,55 jiwa. Hal ini

disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga imbas dari perlambatan ekonomi yang menekan indikator kesejahteraan di sektor rill. Selanjutnya angka kemiskinan terus menurun sampai tahun 2022 yaitu menjadi 26,36 jiwa. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga jual energi domestik yang stabil untuk mencegah naiknya angka kemiskinan (BPS, 2016).

Tabel 1.2
Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013 - 2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PE) (%)
2013	5.56
2014	5.01
2015	4.88
2016	5.03
2017	5.07
2018	5.17
2019	5.02
2020	2.07
2021	3.69
2022	5.31

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5.56 persen, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4.88 persen. Hal ini disebabkan oleh anjloknya konsumsi rumah tangga dan kembali meningkat padtahun 2016 menjadi 5.03 persen. Hal ini disebabkan oleh lapangan jasa keuangan dan asuransi mencapai pertumbuhan yang tinggi (BPS, 2017).

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan sampai tahun 2018 yaitu sebesar 5,17 persen, angka ini merupakan salah satu capaian tertinggi

pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014 lalu. Hal ini terjadi karena meningkatnya lapangan industri pengolahan kemudian diikuti oleh perdagangan besar eceran dan kehutanan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen di tahun 2020 dibanding tahun yang lalu (BPS, 2019) Hal ini terjadi akibat menurunnya permintaan dan penawaran barang dan jasa akibat pandemi covid 19, sehingga hampir seluruh komponen tercatat minus, yaitu seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan impor dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2022 yaitu menempati pada angka 5.31 persen. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan impor barang modal dan bahan baku (KKBP RI, 2023).

Tabel 1.3
Data Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia Tahun 2013 - 2023

Tahun	Indeks Harga Konsumen (IHK)
2013	116.9099
2014	124.3862
2015	132.301
2016	136.9657
2017	142.1824
2018	146.7299
2019	151.1767
2020	154.0807
2021	156.4846
2022	163.0718

Sumber: Word Bank, 2023

Perkembangan IHK dapat dilihat cenderung menurun. Pada tahun 2013 sebesar 116.9099. Pada tahun 2014 IHK meningkat menjadi sebesar sebesar 124.3862 persen. Hal ini terjadi akibat pemotongan subsidi BBM untuk premium dan solar sehingga menyebabkan harga minyak mentah global sangat rendah

(BPS, 2015). Hal tersebut terus meiningkat sampai tahun 2022 menjadi sebesar 163.0718. hal tersebut dikarenakan permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi covid-19, serta Bank Indonesia tetap konsisten dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai target. (Bank Indonesia, 2023).

Tabel 1.4
Data Pendapatan Perkapita (PP) Indonesia Tahun 2013 - 2023

Tahun	Pendapatan Perkapita (PP) (RP)
2013	1827.212
2014	1971.575
2015	1949.204
2016	1855.409
2017	1754.30.6
2018	1806.036
2019	1815.732
2020	1736.052
2021	1813.785
2022	1958.804

Sumber: Word Bank, 2023

Perkembangan pendapatan perkapita selama sepuluh tahun cenderung menyebabkan fluktuasi. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita sebesar 1827.212 US\$ dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu menjadi sebesar 1971.575 US\$ dan terus menurun sampai tahun 2020 menjadi sebesar 1736.052 US\$. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 dimana hampir semua pendapatan perkapita Negara di dunia menurun termasuk Indonesia. Dan kembali meningkat pada tahun 2022 ketika perekonomian Indonesia sudah mulai pulih yaitu pendapatan perkapita menjadi sebesar 1958.804 US\$ (BKF RI, 2021).

Tabel 1.5
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2013 - 2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2013	4.34
2014	4.05
2015	4.51
2016	4.03
2017	3.78
2018	4.39
2019	3.59
2020	4.25
2021	3.38
2022	8.42

Sumber: World Bank, 2023

Selanjutnya perkembangan TPT selama sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 TPT sebesar 4,34 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 4.51 persen. TPT terus menurun sampai tahun 2021 yaitu menjadi 3.38 persen. Dan kembali meningkat sangat drastis pada tahun 2022 menjadi 8.42 persen. Hal ini disebabkan oleh digitalisasi yang sangat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja selanjutnya disebabkan oleh antara latar belakang pendidikan angkatan kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Saputri, 2023), dimana pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Ada beberapa studi yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu, menurut Hasibuan (2023), yang meneliti tentang analisis pengaruh IPM, inflasi, pertumbuhan ekonomi

terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya IPM, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Melalui pengangguran, IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Roseline (2022), meneliti tentang analisis pengaruh PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Lampung. Hasilnya PDRB Perkapita dan IPM masing-masing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021.

Dahlia (2021), meneliti tentang *the influence of unemployment, human development index and gross domestic product on poverty level*. Hasilnya, Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan keadaan pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen (IHK), pendapatan perkapita, pengangguran dan kemiskinan yang telah dipaparkan maka pemerintah perlu memperhatikan setiap perkembangan pertumbuhan ekonomi, IHK, pendapatan perkapita, dan pengangguran guna untuk menjaga kestabilan angka kemiskinan Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, maka penelitian ini akan mencoba menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi

(PE), indeks harga konsumen (IHK), pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan kemiskinan (KM). Yang dalam hal ini akan penulis tuangkan dalam satu tesis yang berjudul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
2. Bagaimanakah pengaruh IHK terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
3. Bagaimanakah pengaruh pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
4. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menganalisis pengaruh indeks harga konsumen (IHK) terhadap kemiskinan

di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Indonesia tahun dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberi manfaat :

1. Untuk menambah khazanah pengetahuan yang terkait dengan kemiskinan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, Indeks harga konsumen (IHK), pendapatan perkapita, dan pengangguran di Indonesia.
2. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti tentang topik yang sama.

1.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, dalam kaitannya dengan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks harga konsumen (IHK), pendapatan perkapita dan pengangguran.
2. Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah kemiskinan.